

Maraknya Tindak Kekerasan, Bikin Kota Bekasi Tidak Layak Anak

BEKASI (IM) - Pre-dikat Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak mulai diragukan. Hal ini terkait dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan.

Berbagai bentuk kekerasan, seperti perundungan, tawuran, pelecehan, hingga kekerasan seksual, terjadi hampir setiap hari. Kondisi ini menandakan bahwa Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat kekerasan anak.

“Kota Bekasi disebut Kota Layak Anak. Namun melihat banyaknya kasus akhir-akhir ini, sebenarnya sudah tidak layak lagi,” kata Adelia, Pembina Relawan Pelita, pada acara deklarasi Relawan Pelita, Senin (10/6) kemarin.

Anggota DPRD Kota Bekasi terpilih itu menjelaskan bahwa Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan Pelita dibentuk untuk membantu menangani kasus kekerasan terhadap anak, termasuk penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga.

“Masalah pola asuh anak sebenarnya ada di tangan orangtua. Kami akan mengadakan kegiatan yang bisa membantu orangtua memperbaiki pola asuh mereka dan menyampaikan ini kepada masyarakat,” tegas Adelia. Untuk bantuan hukum, Relawan Pelita bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi agar dapat menangani berbagai aduan dan laporan dari masyarakat dengan lebih efektif.

“Dengan adanya KPAD, kami berharap ke depannya jika ada kasus di masyarakat, bisa segera dieksekusi dan dibantu. Karena jika kami hanya

bergerak sebagai relawan tanpa payung hukum, itu berisiko. Dengan KPAD, apapun permasalahannya, kita bisa mendapatkan pendampingan lebih cepat,” jelasnya.

Ia juga berharap keberadaan relawan akan mendorong anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk lebih berani melaporkan kejadian yang menimpa mereka demi mendapatkan keadilan.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Novrian, menjelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak, terutama pola asuh dan penggunaan gadget.

“Situs porno yang mudah diakses anak-anak, game yang bernuansa kekerasan, sekarang ini pola asuh anak bukan lagi di tangan orangtua, tapi diambil alih oleh gadget yang sebenarnya anak-anak belum bisa menerima nilai dari alat tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa untuk mencegah kekerasan terhadap anak, diperlukan kerja sama dari seluruh stakeholder. Karena itu, Novrian mengapresiasi kehadiran Relawan Pelita yang berperan aktif dalam upaya tersebut. Novrian juga mengajak masyarakat untuk menjadi pelopor dalam mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, angka kekerasan bisa ditekan dan lingkungan yang nyaman serta aman bagi anak dapat tercipta.

“Masyarakat harus sadar untuk menjadi pelopor, sehingga kasus-kasus di tingkat bawah bisa terdeteksi sejak dini,” tandasnya. ● yan

Pemprov DKI Beri Keringanan Pokok PBB dan Bebas Sanksi Administratif

JAKARTA (IM) - Kabar gembira untuk para warga DKI Jakarta! Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa keringanan pokok PBB dan pembebasan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di 2024.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan Keringanan Pokok PBB.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengungkapkan bahwa keringanan pokok PBB yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah 10% untuk pembayaran pada periode 4 Juni - 31 Agustus 2024 dan 5% untuk pembayaran pada periode 1 September - 30 November 2024.

Pembebasan Sanksi Administratif selain keringanan pokok PBB, Morris Danny juga menjelaskan tentang pembebasan sanksi administratif. “Pembebasan ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2013 sampai dengan tahun pajak 2023 pada periode 4 Juni - 30 November 2024,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembebasan ini dikenakan

untuk Wajib Pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2 sebelum berlakunya Pergub ini tetapi masih dikenakan sanksi administrasi dan membayar angsuran PBB-P2 sebelum jatuh tempo jadwal pembayaran angsuran terakhir, serta bebas dari sanksi bunga angsuran dan bunga terlambat bayar,” ujarnya.

Ketentuan Insentif Pembayaran

Morris Danny juga membeberkan ketentuan insentif pembayaran, di mana insentif ini hanya berlaku untuk PBB-P2 yang masih harus dibayar. “Di samping itu, Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif ini dan pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai metode di seluruh channel pembayaran yang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta,” tuturnya.

Menurut Morris Danny, insentif pembayaran PBB ini memiliki sejumlah manfaat, di antaranya: Membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB, Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, Mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor PBB.

Kebijakan insentif pembayaran PBB DKI Jakarta 2024 memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi. Insentif ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil. Yuk, manfaatkan insentif ini dengan melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di 2024. Dengan melakukan pembayaran PBB, kita turut berkontribusi dalam membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera, katanya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



JELANG SHELL ECO MARATHON ASIA-PASIFIK DAN TIMUR TENGAH

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria (ketiga kanan), VP Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea (keempat kiri), Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka (keempat kanan) dan Manager Tim Arjuna Universitas Indonesia (UI) Zahran Mizuya (kanan) berfoto bersama didekat mobil purwarupa kategori Urban Concept usai konferensi pers Shell Eco Marathon Asia-Pasifik dan Timur Tengah 2024 di Jakarta, Selasa (11/6). Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi mobil hemat energi Shell Eco Marathon dengan diikuti 80 tim pelajar dari kawasan Asia-Pasifik dan Timur Tengah serta 40 Tim pelajar dari Indonesia yang akan dilaksanakan di Sirkuit Internasional Mandalika, NTB, 2 Juli - 6 Juli 2024.

Disdik DKI Jakarta Kecam Konten Pelajar Olok-olok Anak Palestina

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengaku sudah menerima aduan terkait video viral itu. Video itu direkam dan diunggah salah satu siswa SMPN 216 Jakarta. Namun, empat orang anak lainnya yang ada di dalam video itu bukan siswa SMPN 216 Jakarta.

JAKARTA (IM) - Jagat maya dihebohkan dengan video sejumlah anak perempuan yang membuat konten lelucon soal Palestina. Pasalnya, anak-anak dalam video itu makan ayam di restoran cepat saji sembari mengucapkan lelucon yang tak pantas tentang anak-anak Palestina yang menjadi korban genosida Zionis Israel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengaku sudah menerima aduan terkait video viral itu. Video itu direkam dan diunggah salah satu siswa SMPN 216 Jakarta. Namun, empat orang anak lainnya yang ada di dalam video itu bukan siswa SMPN 216 Jakarta.

“Kami sudah menanyakan ke sekolah terkait hal tersebut,” kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/6).

Menurut dia, pihak sekolah telah memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Disdik Provinsi DKI Jakarta juga mengecek perilaku dalam video itu. “Kami mengecek perilaku tersebut dalam video dan sudah memanggil yang bersangkutan dan keluarganya untuk minta maaf,” kata Budi.

Dia menjelaskan, video itu bukan dibuat di lingkungan sekolah. Selain itu, video tersebut juga dibuat saat hari libur sekolah. Kendati demikian, Disdik DKI akan meningkatkan penanaman dan pembinaan karakter siswa di sekolah. “Kami akan menanamkan dan pembinaan penguatan karakter siswa kepada seluruh sekolah,” ujar Budi.

Sebelumnya, SMPN 216 Jakarta telah memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di tengah masyarakat. Adapun klarifikasi pihak sekolah adalah:

1. Kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah pada hari Ahad, 9 Juni 2024 siang, setelah mereka pulang dari tempat ibadah dan makan siang di restoran cepat saji.

2. 4 orang yang berada dalam video tersebut bukanlah peserta didik SMPN 216 Jakarta.

3. Yang memvideokan dan memposting serta pemilik akun instastory tersebut merupakan salah satu peserta didik kelas 9 SMPN 216 Jakarta, yang juga teman dari mereka.

4. Setelah mendalami perihal video yang sudah beredar kami dari pihak sekolah sangat menyayangkan dan mengecek perilaku dalam video tersebut.

5. Kami dari pihak sekolah sudah memanggil yang bersangkutan beserta orang tuanya dan mendesak yang bersangkutan untuk membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan.

6. Kami pihak sekolah selalu mengajarkan dan menjunjung tinggi sikap toleransi.

Sebelumnya, sejumlah remaja perempuan mencoba merekam aktivitas makan di sebuah restoran sambil mengolok-ngolok penderitaan anak Palestina. Apalagi, seorang remaja berkaca mata sambil bercanda menyantap ayam goreng serasa makan tu-

lang anak-anak Palestina “Tulang anak Palestina,” katanya.

Rekan lain sambil menanggapi bilang, “Ini daging anak Palestina.”

Yang satunya meluruskan jika itu bukan saos. “Darah anak Palestina,” kata perekam video yang diikuti tawa bersama. ● yan

KJP Plus Dijadwalkan Cair Dua Bulan Sekaligus Pekan Ini

JAKARTA (IM) - Bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dijadwalkan cair dua bulan sekaligus pekan ini, cek bocoran tanggalnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah mengumumkan rencana penyaluran KJP Plus yang telah dinanti-nanti oleh peserta didik semua jenjang pendidikan SD hingga SMA/ sederajat.

Setelah menunggu proses keputusan penetapan Gubernur mengenai penerima bantuan yang berlangsung sejak 20-30 Mei lalu, pencairan KJP Plus telah siap diberikan pada minggu kedua bulan Juni atau pekan sekarang.

Selain itu, dana pencairan pada bansos tahap 1 tahun 2024 ini akan disalurkan sekaligus atau double untuk bulan Mei dan Juni.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin.

Akan tetapi, mengenai tanggal pastinya pihak Disdik belum memberikan bocoran

lebih lanjut.

Maka dari itu, siswa penerima manfaat KJP Plus diharapkan tetap bersabar menunggu proses pencairan.

Sebelumnya, keterlambatan pembayaran bansos KJP Plus tahap 1 tahun 2024 menimbulkan polemik di masyarakat. Apalagi sebagian besar dana bantuan pendidikan tersebut akan digunakan siswa penerima untuk biaya keperluan sekolah.

Di antaranya membayar ulangan yang kini sedang berlangsung, serta melunasi SPP bulanan.

Para orang tua penerima KJP Plus kemudian membantiri unggahan laman Instagram P4OP Disdik DKI Jakarta @upt-p4op yang diposting 22 April. Tidak sedikit dari mereka mempertanyakan kepastian jadwal pencairan bansos tersebut.

Bahkan ada pula yang mengadu ke PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto dengan mentag akun Instagram pribadinya @herubudihartono. ● yan

Hari Pertama Pelayanan Elektronik di BPN Kota Depok Berjalan Mulus

DEPOK (IM) - Implementasi pelayanan elektronik di hari pertama yang dilakukan BPN Kota Depok berjalan mulus.

Alih media dari konvensional menjadi serba digital, memperpendek rentang kendali pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan tanah.

Erwin Rizkian warga Citayam, Kecamatan Cipayang, Kota Depok menyebut, terobosan yang dilakukan secara bertahap sejak sosialisasi hingga realisasi bentuk kesungguhan Kantor Pertanahan Kota Depok.

“Saya merasakan ada perubahan yang baik. Sudah tidak ribet lagi,” ujar Erwin, yang datang mempertanyakan prosedur balik nama secara elektronik, Senin (10/6). Begitu pula dengan perubahan konvensional ke elektronik. Baginya, itu sebuah keniscayaan di era perkembangan teknologi.

“Ya bagus begini. Hanya ada perbedaan sedikit, dari konvensional ke digital. Penjelasan secara dari petugas loket bisa kita terima,” imbuhnya.

“Kalau pun ada satu dua kekurangan, bagi saya itu ya biasa. Mananya juga penyelesaian. Yang terpenting terus disosialisasikan, biar tidak kaget,” ujar Erwin.

Senada disampaikan Erwin, Yuki warga Kalimulya, Cilodong, Kota Depok men-



gaku sudah mendapatkan penjelasan, bahkan dirinya sudah menerima beberapa contoh sertifikat elektronik.

“Saya pegang contohnya. Bentuknya berbeda, tapi intinya sama, sertifikat juga kan,” kata Yuki seraya menunjukkan bentuk sertifikat elektronik di ponselnya.

Yuki juga tidak merasa kaget dengan pelayanan yang semua serba digital. Bahkan menurutnya akan lebih cepat dan terukur.

“Kalau secara elektronik begini, saya tak perlu antre berlama-lama. Nanti Kantor Pertanahan Kota Depok sudah menjadwalkan hari pendaftarannya,” ungkap Yuki.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok, Indra Gu-

nawan yang memantau langsung hari pertama pelayanan elektronik juga membantu memberikan penjelasan warga yang datang.

Ia memastikan bahwa semangat implementasi layanan elektronik merupakan satu upaya mewujudkan pelayanan transparan, akurat, dan cepat.

Langkah ini, sebagai upaya mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Lengkap. Sebab, dengan dinyatakan sebagai Kota Lengkap, maka suatu daerah akan memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya, Pemerintah daerah (Pemda) bisa lebih mudah dalam menentukan kebijakan terkait tata ruang wilayah.

“Tentu harapan besarnya, menekan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah yang

kerap menimbulkan sengketa,” jelas Indra Gunawan di sela-sela aktivitasnya.

Lalu ketika masyarakat sudah menerima sertifikat tanah elektronik, artinya sudah masuk ke dalam data base.

“Jadi tidak perlu khawatir karena rusak, hancur, bahkan hilang,” kata Indra.

Keunggulan lainnya, seripikat Tanah Elektronik tidak semudah itu duplikasi, dipalsukan atau digandakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Termasuk, juga mafia tanah karena sudah ada dalam database yang bisa dicek kapan saja keabsahannya.

Pastinya, sambung Indra, Kantor Pertanahan Kota Depok mengajak semua pihak bersinergi, menyukseskan

program dari Kementerian ATR/BPN.

“Adanya kekurangan dan kelebihan adalah bagian dari proses itu sendiri. Kita pastikan bahwa ini demi pelayanan yang lebih modern. Mohon bantuan, kritik, saran, dalam mengawal program baru ini,” tutur Indra Gunawan.

Untuk diketahui ada 11 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang secara serentak mulai melakukan layanan elektronik.

Peluncuran pelayanan elektronik berlangsung di Gedung Sate, Bandung, pada Minggu (9/6) lalu.

Adapun 11 Kantah yang diresmikan implementasi layanan elektroniknya antara lain, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.

Terkait hal ini, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta implementasi Layanan Elektronik terus digencarkan.

“Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sukseskan, kita kawal bersama mudah-mudahan segera dalam waktu dekat Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang lengkap semua kabupaten/kota-nya bisa melayani secara elektronik,” kata AHY. ● ber

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT TRISTAR SEMESTA ELECTRIC (“Perseroan”) tertanggal 07 Juni 2024, No. 13, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH, LL.M, Notaris di Kota Bogor, Para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk melakukan pembubaran dan proses likuidasi terhadap Perseroan dan kepada Kreditor yang mempunyai hak tagih kepada Perseroan dapat mengajukan tagihan-tagihannya kepada Perseroan (Kantor Perseroan) dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, disertai bukti-bukti yang sah.

Demikianlah Pengumuman ini guna memenuhi pasal 147 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

TTD
Likuidator Perseroan